

## Bupati Temui Kementerian Kesehatan PPU Terima Anggaran Rp46 Miliar Tahun Depan



*Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025*

**Jakarta** – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, terus memperkuat pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Komitmen ini kembali ia buktikan lewat pertemuannya dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Kamis (2/10).

Dalam pertemuan itu, Pemkab PPU berhasil mengamankan dukungan anggaran senilai Rp46 miliar dari Kementerian Kesehatan RI untuk tahun 2026. Dana ini difokuskan pada penyediaan alat kesehatan modern seperti *CT scan* dan *cath lab* untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan puskesmas di empat kecamatan.

“PPU membutuhkan sinergi langsung dengan Kemenkes untuk mendukung peningkatan layanan dasar di bidang kesehatan. Hadirnya IKN Nusantara menuntut percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan,” ungkap Mudyat.

Ia menegaskan, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat mendesak. Saat ini masih banyak warga PPU yang harus dirujuk ke Balikpapan untuk layanan medis lanjutan. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat sekaligus mengurangi potensi pendapatan daerah dari sektor kesehatan.

“Bantuan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat PPU. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkes RI,” ucapnya.

Selain menambah fasilitas, Pemkab PPU juga menyiapkan dokter spesialis dan tenaga kesehatan di RSUD RAPB agar pemanfaatan alat kesehatan bisa optimal pada 2026.

“Penyediaan layanan kesehatan tidak hanya pada fasilitasnya saja, tetapi juga sumber daya manusianya. Kami siapkan dokter spesialis agar pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah semakin optimal,” jelas Mudyat.

Sementara itu, Wamenkes Prof. Dante menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap langkah Pemkab PPU. “Kemenkes akan menyalurkan bantuan Rp46 miliar untuk RSUD Ratu Aji Putri Botung sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan layanan kesehatan di daerah penyangga IKN,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan sarana kesehatan di PPU penting agar masyarakat tidak lagi harus berobat ke luar daerah, sekaligus memperkuat pemerataan akses layanan kesehatan secara nasional. “Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat mendapat layanan kesehatan yang baik tanpa terkecuali,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Kemenkes RI, Direktur RSUD RAPB, Kepala Dinas Kesehatan PPU, Kepala RSUD Sepaku, serta Bapelitbang PPU. **(adv/hms/wn/mh)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Bupati Temui Kementerian Kesehatan PPU Terima Anggaran Rp46 Miliar Tahun Depan, 03/10/2025

**Catatan:**

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU 36/2009) tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
2. Pasal 3 UU 36/2009 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Dalam Pasal 14 UU 36/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
  - (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
  
4. Dalam Pasal 19 UU 36/2009 diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.